

2019

# LAPORAN

# MASUKAN PRMS

Usulan Program Hibah Jalan Daerah  
Tahun 2020



## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
BAB 1: PENDAHULUAN .....	5
1.1 TUJUAN.....	5
1.2 REGULASI BIDANG JALAN .....	5
1.3 KONDISI JALAN DAN PERMASALAHANNYA .....	7
1.4 PROGRAM 2017 & ESTIMASI CAPAIAN KINERJA .....	9
BAB 2: PROGRAM PENANGANAN JALAN 2018 & MASUKAN HASIL PRMS .....	14
2.1 PRIM DAN PRMS .....	14
2.2 PRINSIP DALAM PROGRAM PRMS .....	14
2.3 SIKLUS PERENCANAAN DALAM PROGRAM PRMS .....	14
2.4 VERIFIKASI DATA INPUT.....	16
2.5 HASIL REKOMENDASI PRMS .....	17
BAB 3: KESIMPULAN DAN SARAN .....	18
1.1 KESIMPULAN .....	18
1.2 SARAN/MASUKAN .....	18
LAMPIRAN .....	19
ABSENSI RAPAT BULANAN .....	19
FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT .....	20

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Infrastruktur jalan merupakan salah satu asset public utama dalam transportasi yang paling sering digunakan oleh public untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, bisnis, kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu pendukung utama aktifitas social ekonomi suatu negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan.

Jalan yang telah selesai dibangun dan dioperasikan akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur jalan sehingga pada suatu saat dapat menghambat kegiatan masyarakat. Jaringan jalan di Indonesia sebagian besar terdiri dari jalan daerah yang meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Oleh karena itu, jalan provinsi dan kabupaten merupakan penunjang utama kegiatan ekonomi, social, dan pengembangan wilayah yang direncanakan dalam umur tertentu dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu melakukan upaya agar jalan tersebut dapat memberikan pelayanan sesuai dengan umur yang direncanakan melalui pemeliharaan jalan yang optimal. Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan atau Teknik manajemen asset jalan yang tepat.

Salah satu siklus dalam pengelolaan jalan daerah adalah Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran (PPP). Selama ini perencanaan jalan baik untuk jalan baru maupun perbaikan jalan yang sudah ada dari instansi terkait menggunakan teknik perencanaan secara manual, apabila diterapkan pasti terdapat kesalahan akibat pembacaan data lapangan (hasil pengukuran lapangan) yang kurang tepat, sehingga ukuran pembiayaan jalan juga menjadi kurang baik. Demikian juga dalam perencanaan penanganan jalan baik untuk penentuan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan atau peningkatan, yang dilakukan dengan metode manual akan menghasilkan justifikasi pembiayaan jalan akan kurang efektif, oleh karena itu penggunaan program aplikasi yang efektif dalam penentuan tersebut akan menghasilkan keluaran yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menjawab tantangan dan kebutuhan terkait proses PPP di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Hibah Jalan Daerah telah memberikan hibah baik berupa anggaran fisik yang focus pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan penerapan kontrak long segmen (semua segmen dalam ruas jalan yang ditangani akan mendapat pekerjaan penanganan sesuai kebutuhan lapangan), dana insentif untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan, dan penyediaan aplikasi sebagai alat bantu PPP yang sederhana dan cocok diterapkan di daerah yang pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia. Aplikasi alat bantu PPP yang dikembangkan menggunakan dana hibah ini sejak tahun 2014 adalah aplikasi berbasis Microsoft Access yang dikenal dengan nama sistem manajemen jalan provinsi atau provincial Road Management System (PRMS).

Laporan analisis dari aplikasi PRMS antara lain berisi usulan prioritas ruas jalan yang akan ditangani, serta kondisi segmen jalan, volume dan biaya program pekerjaan penanganan jalan yang direkomendasikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Laporan tersebut dipresentasikan kepada bappeda dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Pihak Bappeda memberikan masukan terkait ketersediaan pagu anggaran penyelenggaraan jalan untuk tahun mendatang sedangkan FLLAJ mengevaluasi usulan prioritas ruas jalan yang akan ditangani apakah sudah mengakomodir keluhan dan kebutuhan masyarakat pengguna jalan. Setelah dilakukan koreksi terhadap hasil PKRMS berdasarkan masukan dan koreksi dari bappeda dan FLLAJ maka unit perencanaan teknis jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat menghasilkan dokumen PPP.

Namun demikian PRMS ini hanya sebuah tools yang sangat tergantung pada kemampuan dan ke-sahihan operator dalam menentukan hasil input data dan atau verifikasi data needs, sehingga kemampuan operator dalam menjustifikasi dan memverifikasi data input akan menunjukkan efektifnya penetapan kebijakan penanganan dan pembiayaan ruas jalan.

## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1 TUJUAN

Kegiatan konsultasi, verifikasi serta masukan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) terhadap program PRMS yang dihasilkan pada program PHJD ini bertujuan untuk memberikan masukan pada program aplikasi PRMS dalam menentukan penanganan dan pembiayaan jalan pada tahun-tahun selanjutnya berdasarkan data input yang benar serta justifikasi data input yang akurat, sehingga output program tersebut berupa paket pekerjaan terkait penanganan dan pembiayaan jalan akan dilakukannya dapat lebih efektif dan tepat. Pemanfaatan anggaran daerah dalam pembiayaan pemeliharaan jalan dapat lebih sesuai dengan kondisi jalan, pembebanan lalu lintas pada jalan serta kondisi hasil inventarisasi lapangan yang terqualifikasi secara efektif.

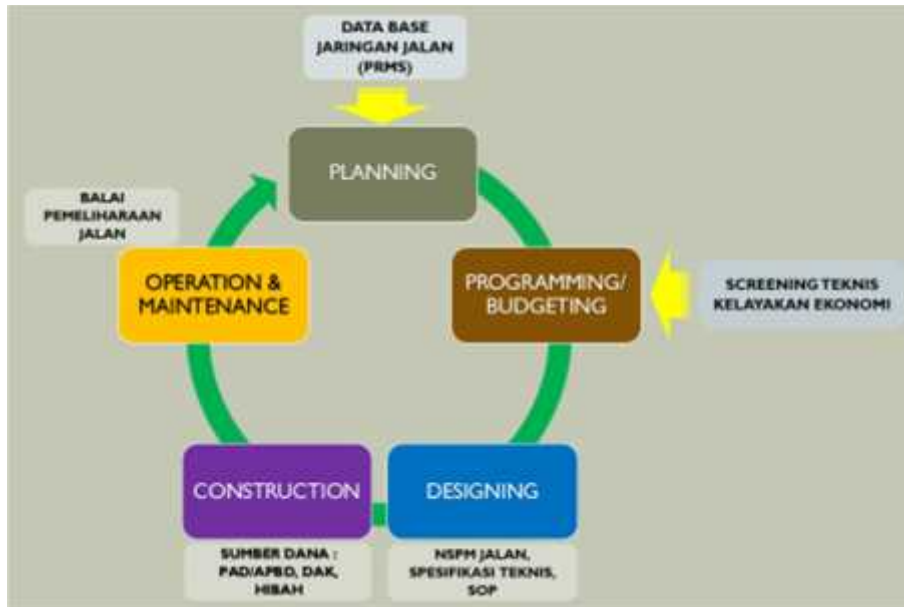
### 1.2 REGULASI BIDANG JALAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangun daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019 – 2024. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), maka ditetapkan pasangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M. Sc. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang dilantik pada 13 february 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen RPJMD secara teknokratik menjabarkan permasalahan pembangunan, usi strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

## KEBIJAKAN DAERAH BIDANG JALAN

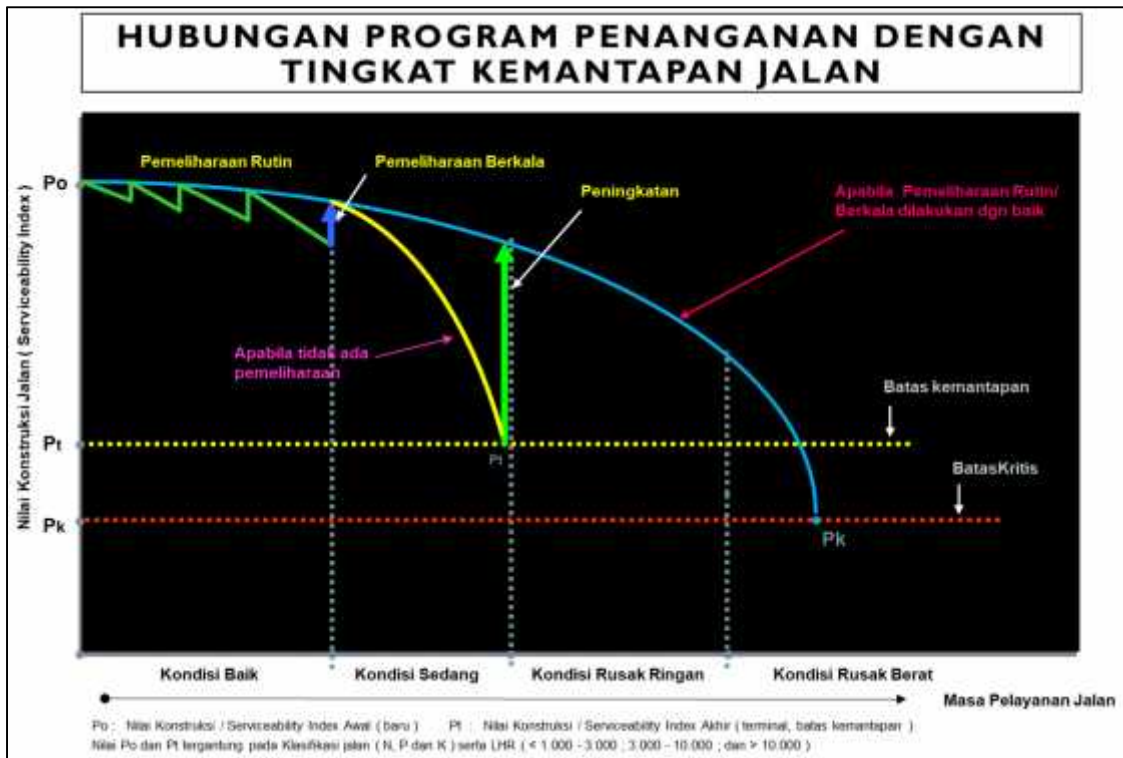
1. Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;
2. Pergub No. 69 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;



Gambar Siklus Pengelolaan Jalan



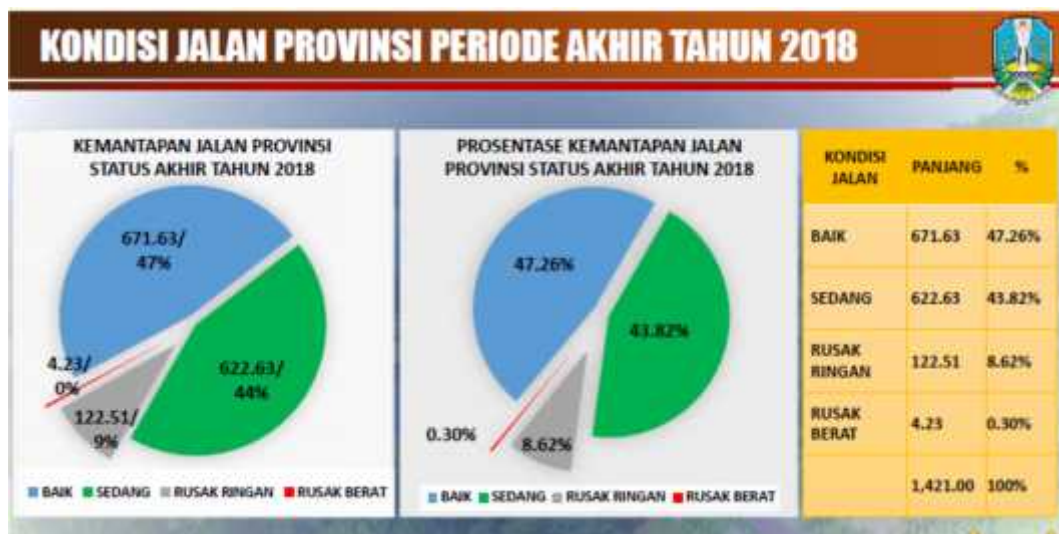
Diagram Program Penanganan Jalan



Grafik Hubungan Program Penanganan Jalan dengan Tingkat Kemantapan Jalan

Grafik di atas menunjukkan bahwa jalan sewajarnya harus dilakukan pemeliharaan rutin agar umur rencana jalan dapat terpenuhi. Selain itu biaya rehabilitasi atau perbaikan jalan akan membengkak jika tidak dilakukan pemeliharaan berkala.

### 1.3 KONDISI JALAN DAN PERMASALAHANNYA



#### Permasalahan:

- Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jalan jauh lebih tinggi dari kondisi infrastruktur jalan provinsi yang ada serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk penanganan jalan provinsi yang ideal sesuai kondisi infrastruktur jalan yang ada.
- Sebagian besar umur rencana jalan telah terlampaui, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan yang relative cepat.
- Sebagian besar lebar jalan provinsi belum memenuhi standar (hanya 48,66% atau sepanjang 691,43 Km lebar jalan provinsi yang telah memenuhi standar dari 1.421 Km Panjang jalan Provinsi.
- Beberapa ruas, utamanya pada perkotaan dan Kawasan strategis memiliki nilai VCR > 1, hal ini mengakibatkan terganggu lalu lintas dan mempengaruhi waktu tempuh kendaraan.

#### Rencana Strategis Penanganan Jalan

- Penanganan Jangka Pendek
  1. Pemeliharaan rutin
  2. Pemeliharaan berkala pada ruas jalan pada kondisi jalan sedang dan rusak ringan.
  3. Rekonstruksi pada ruas jalan Provinsi dalam kondisi rusak berat untuk peningkatan struktur.
- Penanganan Jangka Panjang
  1. Pengembangan jalan menuju kemantapan kapasitas jalan yang lebih baik (sesuai standar jalan provinsi).





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

## BINA MARGA MENYONGSONG TAHUN ANGGARAN 2020

- ▶ DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI D (PEMBANGUNAN) DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

SURABAYA | 6 NOVEMBER 2019

### ARAH PEMBANGUNAN JAWA TIMUR 2020

**NAWABHAKTI SATYA** *Korlat* demi terwujudnya Jatim yang mulia melalui pembangunan yang berdaya saling multisektoral dan multidimensi, membuat mulia di mata rakyat dengan hadlinya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Secara garis besar arah pembangunan Jawa Timur diformulasikan dalam **Nawa Bhakti Satya** meliputi:

- Jatim Sejahtera
- Jatim Kerja
- Jatim Cerdas & Sehat
- Jatim Akses**
- Jatim Berkah
- Jatim Agro
- Jatim Berdaya
- Jatim Amanah
- Jatim Harmoni



## BHAKTI JATIM AKSES

(Jatim Akses / Infrastruktur Jalan)

**JATIM AKSES** menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin ketersediaan ruang ekonomi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya sehingga terdapat infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan.



**JATIM AKSES** bertujuan untuk :

Memajukan Infrastruktur Dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, Dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir Dan Desa Terluar Seperti :

- Kawasan Lingkar Willis,
- Lingkar Bromo,
- Lingkar Liris,
- Gerbang Kertosusila,
- Koridor Martim Pantura Jawa-madura,
- Koridor Martim Selatan Jawa.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



## RANCANGAN PENGELOLAAN KEBINAMARGAAN TAHUN 2019-2024

### KONDISI EKSTING JALAN PROVINSI DI JAWA TIMUR TAHUN 2019

❖ Panjang Jalan Provinsi	1.421,00 Km
❖ Panjang Jembatan Provinsi	10.870,02 Meter (395 Bt)
❖ Prediksi Kondisi Kemantapan Jalan	91,77 % (1.304,05 Km)
❖ Prediksi Kondisi Jalan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan	61,82 % (878,45 Km)

**TUJUAN**  
Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

**SASARAN**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pengelola jalan.
2. Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial

### RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPU BINA MARGA

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jalan provinsi dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pengelola jalan provinsi.
2. Pengembangan yang tepat, efektif, efisien pada masa jalan provinsi dalam rangka pemerataan dan pemerataan jalan yang aman dan nyaman.
3. Pengembangan jaringan jalan provinsi untuk meningkatkan wilayah-wilayah strategis dan potensial.
4. Pembangunan jalan baru untuk pemerataan akses ke kawasan tertinggal, strategis dan potensial.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



# ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020



## KOMPOSISI BELANJA

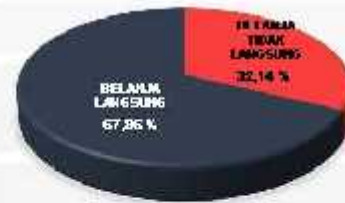
**BELANJA DAERAH Rp. 571.719.127.315,00**

terdiri atas :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 183.748.237.325,00**
  - Gaji dan Tunjangan Rp. 67.642.195.650,00
  - Tambahan Penghasilan PNS Rp. 116.106.041.675,00
- BELANJA LANGSUNG Rp. 387.970.889.990,00 (terlampir)**

### PENGGUNAAN BELANJA

- BELANJA TIDAK LANGSUNG** Dipergunakan Untuk Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara,
- BELANJA LANGSUNG** Dipergunakan Untuk Belanja Perencanaan Dan Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

No.	PROGRAM	APBD
1	Program Penyelenggaraan Kesenian	22.411.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Perawatan Sarana Budaya	7.497.000.000,00
3	Program Penyelenggaraan Perawatan Dan Pemeliharaan Jalan	5.621.317.400,00
4	Program Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Perumahan	5.190.440.000,00
5	Program Penyelenggaraan Pemeliharaan Perumahan	1.370.000.000,00
6	Program Penyelenggaraan Kesenian Dan Seni Pertunjukan Dan Pelestarian Dan Pemeliharaan Sifat Asli Dan Peragaan Lahan Perumahan	13.568.180.000,00
7	Program Penyelenggaraan Usaha Telekomunikasi, Telekomunikasi Data Dan Internet	11.571.000.000,00
8	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	35.441.550.000,00
9	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	35.344.380.000,00
10	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	25.156.100.000,00
11	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	25.270.000.000,00
12	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	27.346.440.000,00
13	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	27.031.770.000,00
14	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	34.413.330.000,00
15	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	24.425.480.000,00
16	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	35.718.350.000,00
17	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	25.458.210.000,00
18	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	35.212.170.000,00
19	Program Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Jalan Aspal Perumahan	25.000.000,00
<b>JUMLAH APBD 2020</b>		<b>187.920.889.990,00</b>

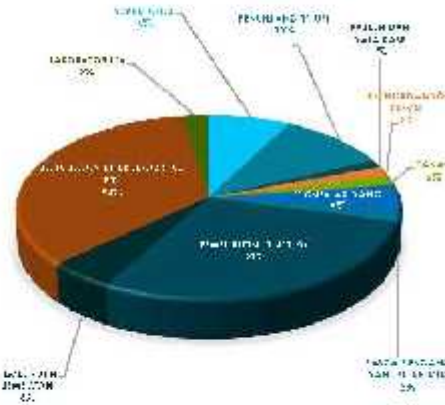
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



## RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA LANGSUNG

1. Penunjang Kelembagaan	Rp. 29.867.163.000,00
2. Penunjang penanganan jalan dan jembatan 11 UPT (Survei Kondisi jalan, Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dan Monitoring/Evaluasi)	Rp. 40.180.000.000,00
3. Kapan Jalan dan Jembatan dan Pengalibangan Data Base	Rp. 5.200.000.000,00
4. Perencanaan dan Pengrealisasian Paranginan Jalan dan Jembatan	Rp. 6.900.000.000,00
5. Pongdakan Tanah	Rp. 6.308.830.000,00
6. Monitoring Evaluasi 4 Bidang	Rp. 19.219.795.500,00
7. Pangerinan Pasca Bencana Alam dan Jembatan Khusus	Rp. 6.800.000.000,00
8. Pemeliharaan Rutin Jalan 1.421 Km	Rp. 112.118.618.300,00
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 19.800.000.000,00
10. Batu Jalan Diperkeras 108 Km	Rp. 133.044.024.000,00
11. Pelayanan Laboratorium Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 387.970.085.000,00</b>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



7

## RENCANA PENANGANAN RAPBD TAHUN 2020

### KONDISI KEMANTAPAN JALAN PROVINSI AKHIR TAHUN 2019:

<b>MANTAP</b>	<b>: 1.304,05 Km</b>
	<b>( 91,77% ) terdiri atas:</b>
	Kondisi BAIK : 671,68 Km / 47,27%
	Kondisi SEDIKIT : 632,42 Km / 44,50%
<b>TIDAK MANTAP</b>	<b>: 126,74 Km</b>
	<b>( 8,92% ) terdiri atas:</b>
	Kondisi RUSAK RINGAN : 116,95 Km / 8,23%
	Kondisi RUSAK BERAT : 0 Km / 0%

### PRIORITAS PENANGANAN RAPBD TAHUN 2020 sebagai berikut :

1. Jarak mempertahankan kondisi kemandapan dan dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.421 Km
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang : 0.870,07 Km atau 995 buah jembatan.
3. Dalam rangka meningkatkan daya dukung kapasitas jalan pada ruas jalan yang belum memenuhi lebar standar dan dilakukan penanganan dengan batu jalan diperkeras >250 sepanjang 108 Km



**MEMPERTAHANKAN KONDISI JALAN DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PROVINSI AGAR MAMPU MELAYANI PENGGUNA JALAN DENGAN OPTIMAL**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



## RENCANA KERJA TAHUN 2020

### PENANGANAN BAHU JALAN DIPERKERAS

No.	URAIAN KEGIATAN	PANJANG PENANGANAN (Km)	ALOKASI ANGGARAN
I	<b>UPT PJJ SURABAYA</b>	15,00	15.000.000.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,00	4.000.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Dts. Kota Lamongan - Ets. Kab. Mojokerto (Link 145)	3,00	4.000.000.000,00
3	Bahulu dipapkeras di Jemberlegowo - Ets. Kab. Madiun (Link 151)	4,00	5.000.000.000,00
4	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	4,00	5.000.000.000,00
II	<b>UPT PJJ MUBUKUTU</b>	14,00	15.179.854.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	3,50	8.200.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	4,50	7.000.000.000,00
3	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	6,00	9.979.854.000,00
III	<b>UPT PJJ BOJONGGORO</b>	13,00	12.306.502.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	4,00	5.000.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	9,00	7.306.502.000,00
IV	<b>UPT PJJ MADURA</b>	3,00	1.000.000.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151) dan Jember Kota Bekas - Ets (Link 151)	3,00	1.000.000.000,00

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



5

## RENCANA KERJA TAHUN 2020

### PENANGANAN BAHU JALAN DIPERKERAS (Lanjutan)

No.	URAIAN KEGIATAN	PANJANG PENANGANAN (Km)	ALOKASI ANGGARAN
V	<b>UPT PJJ PASURUAN</b>	14,00	17.946.415.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	11,00	13.400.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,00	4.546.415.000,00
VI	<b>UPT PJJ KEDIRI</b>	8,00	11.261.457.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,50	5.000.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	4,50	6.261.457.000,00
VII	<b>UPT PJJ JEMBER</b>	15,80	18.508.150.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,50	8.500.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	7,10	8.508.150.000,00
VIII	<b>UPT PJJ BANYUWANGI</b>	18,10	21.992.468.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,91	4.500.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,10	3.700.000.000,00
3	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	5,10	5.792.125.000,00
4	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	5,79	4.000.000.000,00
5	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	6,20	4.260.343.000,00
IX	<b>UPT PJJ PAKSIKARAN</b>	14,00	21.388.800.000,00
1	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,50	11.550.000.000,00
2	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	3,50	11.550.000.000,00
3	Bahulu dipapkeras di Jalan Babat - Ets. Kab. Jombang (Link 148)	7,00	11.550.000.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>188,00</b>	<b>183.844.024.000,00</b>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



6

## BAB 2: PROGRAM PENANGANAN JALAN TAHUN ..... & MASUKAN HASIL PRMS

### 2.1 PHJD DAN PRMS

Sejak tahun 2013, aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) mulai dikembangkan khusus untuk keperluan Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dengan komposisi pendanaan terdiri dari 40% Hibah Pemerintah Australia dan 60% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program PRIM diujicobakan penerapannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupten Lombok Barat. Semua pihak termasuk pemerintah pusat menilai keberhasilan PKRMS sebagai alat bantu PPP sehingga sejak tahun 2018, PKRMS telah digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman, dan penganggaran untuk penyusunan usulan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan sumber dana 100% Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada beberapa Provinsi dan Kabupaten terpilih. Keunggulan PKRMS sebagai alat bantu PPP dibandingkan dengan para pendahulunya adalah PKRMS tidak hanya berfungsi sebagai sumber database utama (jaringan jalan, titik referensi, inventarisasi dan kondisi jalan, jembatan, gorong-gorong, dan dinding penahan tanah, lalu lintas, harga satuan, koordinat trase jalan) untuk keperluan perencanaan tetapi juga mampu menganalisis data-data tersebut sehingga menghasilkan laporan yang meliputi laporan analisis (volume pekerjaan dan biaya), laporan statistic (data kemantapan jalan), stripmap, rencana menengah, dan peta.

### 2.2 PRINSIP DALAM PROGRAM PRMS

Prinsip analisis dan pemrograman dapat didasarkan atas prinsip analisis kebutuhan pemeliharaan, penentuan prioritas pemeliharaan rutin, dan penentuan prioritas pekerjaan utama. Untuk dapat mengakomodir pekerjaan dengan anggaran yang terbatas, diperlukan adanya penentuan tingkat prioritas pemeliharaan rutin pada setiap ruas jalan. Sedangkan tingkat prioritas untuk tipe pekerjaan utama ditentukan dengan cara menghitung nilai Triggered Priority Index (TPI). Perhitungan nilai TPI merupakan perkalian nilai bobot dan nilai Multi Criteria Analysis (MCA).

### 2.3 SIKLUS PERENCANAAN DALAM PROGRAM PRMS

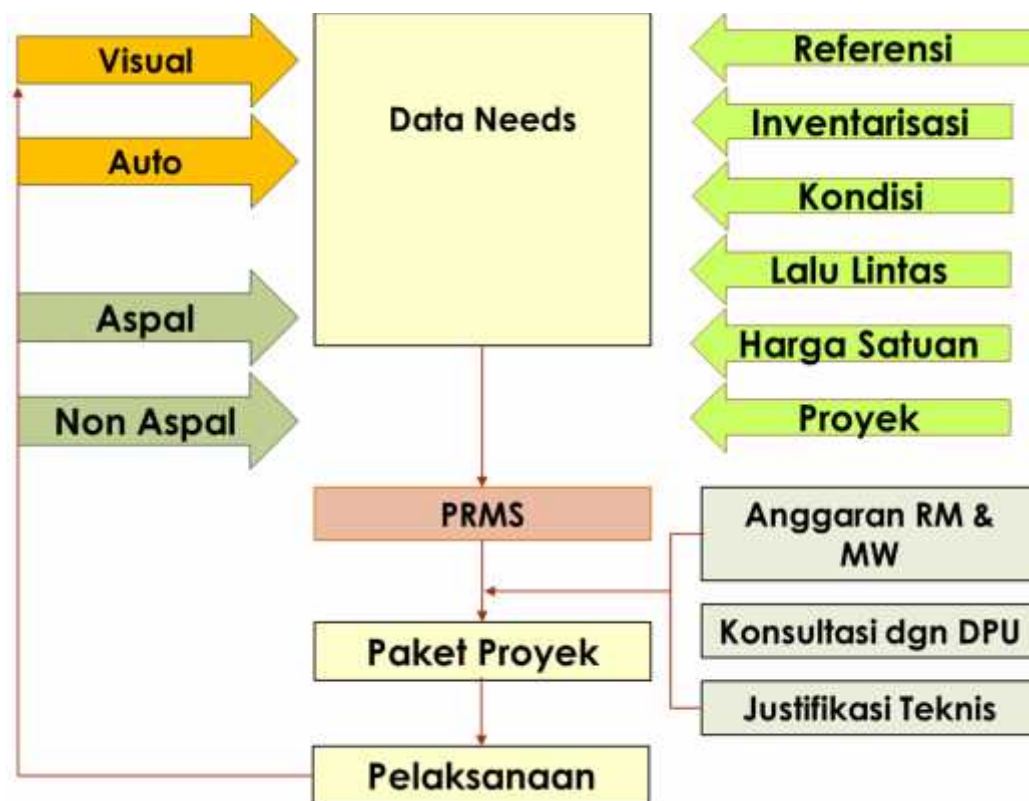
Program PRMS seperti program lainnya memiliki siklus perencanaan yang spesifik sesuai dengan konten dan fitur yang dikembangkan dalam program tersebut. Dalam program PRMS ini siklus perencanaan terdiri atas 3 bagan besar :

1. Data Input Program
2. Eksekusi Program
3. Output Program

Keluaran dari hasil eksekusi program perlu dilakukan verifikasi ulang sehingga keluaran program dapat sesuai dengan kondisi sesungguhnya dilapangan

Secara lengkap siklus perencanaan di desain dalam program PRMS digambarkan sebagai berikut :

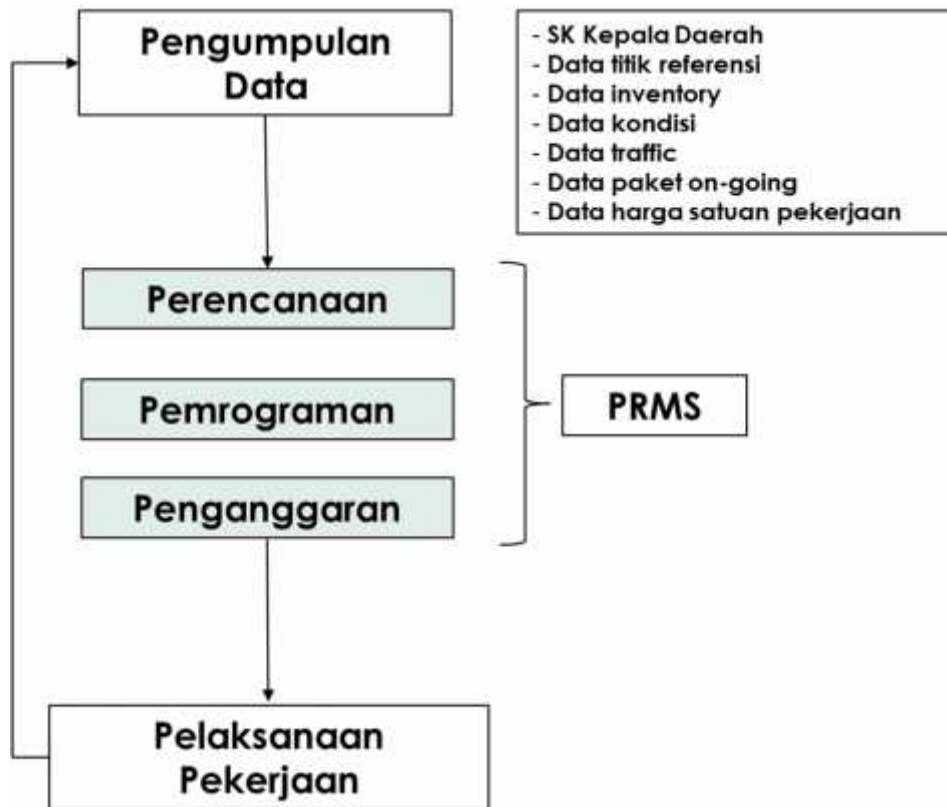
1. Kondisi : perlu verifikasi secara detail dengan kondisi terkini dilapangan, sehingga perlu ada data base lapangan yang ter-update secara berkala minimal dalam rentang 1 (satu) tahun
2. Lalulintas : perlu pengukuran lapangan dalam waktu yang cukup (minimal 7 hari) sebagai indikator beban yang harus dipikul oleh jalan
3. Inventarisasi : data input yang sudah di-colect dalam penetapan inputing dalam program perlu dilakukan verifikasi dari tim teknis lapangan seperti dari juru ukur jalan di tiap-tiap daerah
4. Harga satuan : perubahan atau perbedaan yang signifikan atas harga satuan khususnya upah (ongkos) perlu dilakukan croscheck secara lebih cermat
5. Pelaksanaan : dalam menetapkan skala prioritas dalam penentuan ruas jalan yang mendapat penanganan perlu juga dimasukan unsur kebutuhan mendesak akibat adanya perubahan kebijakan misalnya kebijakan pariwisata sebagai akibat dari isu global ataupun isu internasional didaerah.



## 2.4 VERIFIKASI DATA INPUT

Verifikasi data lapangan dapat dilakukan saat pendataan data kondisi lapangan terhadap semua ruas jalan provinsi yang ditinjau oleh tim teknis dilapangan (daerah), sehingga validasi data input dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa data tersebut antara lain seperti tabel dibawah ini :

### 1. Data Input Kondisi Jalan



### 2. Data Input Data Lalulintas





## 2.5 HASIL REKOMENDASI PRMS

Hasil keluaran dari program PRMS untuk Usulan Program Hibah Jalan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut (terlampir)

## BAB 3: KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 KESIMPULAN

1. Hasil keluaran program PRMS untuk ruas jalan provinsi Jawa Timur dapat diterima oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, terutama untuk Usulan Program Hibah Jalan daerah yang meliputi wilayah UPTPJJ Malang dan Probolinggo.
2. Persetujuan tersebut perlu segera disahkan pula oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disesuaikan dengan rencana anggaran tahun 2020.

### 1.2 SARAN/MASUKAN

1. Usulan Program Hibah Jalan Daerah Tahun 2020 untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan pengesahan oleh Kepala Daerah.
2. Perlu segera disusun desain perencanaan penanganan jalan sesuai usulan tersebut.

## LAMPIRAN

## ABSENSI RAPAT

terlampir

## FOTO-FOTO KEGIATAN RAPAT













**USULAN PROGRAM PENANGANAN RUAS JALAN DENGAN HIBAH PHJD TAHUN 2020**

KSPN : Bromo Tengger Semeru  
Provinsi : Jawa Timur

Paket	Sumber Dana	Ruas Jalan	Nama Ruas	Panjang (Km)	Penanganan	Lebar (m)	Panjang Penanganan (km)				Kebutuhan Anggaran (Rp)					Total Anggaran Untuk Pemeliharaan (Rp Juta)	Panjang Penanganan pelebaran (km)	Kebutuhan Anggaran pelebaran (Rp Juta)	Total Anggaran
							Penunjang (km)	Berkala (km)	Rehabilitasi (km)	Peningkatan Struktur (km)	Penunjang (Rp Juta)	Berkala (Rp Juta)	Rehabilitasi (Rp Juta)	Peningkatan Struktur (Rp Juta)	RK (Rp Juta)				
P1-PHJD	APBN PHJD	194	Pandaan - Tretes	9.3	PR + RK	6.7	-	-	-	-	-	-	-	1.267.1	234.8	1.501.9	-	-	1.501.9
P1-PHJD	APBN PHJD	196	Kejayan - Tosari	35.3	PB + PR + RK	5.2	-	9.58	-	-	-	-	-	1.326.2	609.4	16.599.5	9.3	9.730.9	26.330.4
P1-PHJD	APBN PHJD	197	Kejayan - Purwosari	19.0	PB + PR + RK	7.0	-	8.00	-	-	-	-	-	2.095.4	275.4	21.761.0	-	-	21.761.0
P1-PHJD	APBN PHJD	198	Purwodadi - Nongkojajar	20.9	PB + PR + RK	5.7	-	6.85	-	-	-	-	-	4.753.4	439.2	21.795.4	7.8	8.187.80	29.983.2
P2-PHJD	APBN PHJD	200	Bts. Kota Lumajang - Bts. Kab. Jember	14.6	PR + RK	6.6	-	-	-	-	-	-	-	4.061.3	252.9	4.314.3	-	-	4.314.3
P2-PHJD	APBN PHJD	200.11K	Jln. Letjen. Panjaitan (Lumajang)	0.6	PR + RK	10.0	-	-	-	-	-	-	-	13.6	11.9	25.5	-	-	25.5
P2-PHJD	APBN PHJD	200.12K	Jln. Kapten Suwandak (Lumajang)	0.8	PR	7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.2	16.2	23.4	-	-	23.4
P2-PHJD	APBN PHJD	200.13K	Jln. Mayjen Sukertiyo (Lumajang)	0.8	PR	7.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	15.6	15.9	-	-	15.9
P2-PHJD	APBN PHJD	200.14K	Jln. Mahakam (Lumajang)	1.2	PR + RK	7.0	-	-	-	-	-	-	-	361.1	24.4	385.5	-	-	385.5
P3-PHJD	APBN PHJD	188	Bts. Kota Malang - Bts. Kota Batu (Sengkaling)	1.8	PR	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	36.8	36.8	-	-	36.8
P3-PHJD	APBN PHJD	188.11K	Jln. Tlogo Mas (Malang)	2.3	PR + RK	10.0	-	-	-	-	-	-	-	82.3	42.4	124.7	-	-	124.7
P3-PHJD	APBN PHJD	188.12K	Jln. Mayjen. Hariyono (Malang)	1.9	PR + RK	10.0	-	-	-	-	-	-	-	140.9	38.0	178.9	-	-	178.9
P3-PHJD	APBN PHJD	188.13K	Jln. Sukarno - Hatta (Malang)	2.7	PR + RK	14.0	-	-	-	-	-	-	-	87.6	54.2	141.8	-	-	141.8
P3-PHJD	APBN PHJD	188.14K	Jln. Borobudur (Malang)	1.1	PR	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	22.4	22.4	-	-	22.4
P3-PHJD	APBN PHJD	188.15K	Jln. A. Yani (Malang)	1.6	PR + RK	14.0	-	-	-	-	-	-	-	15.1	32.5	47.6	-	-	47.6
P3-PHJD	APBN PHJD	189	Bts. Kota Malang - Turen	20.0	PR + RK	7.6	-	-	-	-	-	-	-	2.243.8	346.7	2.590.5	-	-	2.590.5
P3-PHJD	APBN PHJD	189.11K	Jln. Kol. Sugiono (Malang)	1.1	PR + RK	12.0	-	-	-	-	-	-	-	107.6	17.1	124.7	-	-	124.7
P3-PHJD	APBN PHJD	190	Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso)	8.0	PR + RK	7.0	-	-	-	-	-	-	-	827.6	146.5	974.1	-	-	974.1
P3-PHJD	APBN PHJD	191.11K	Jln. Raya Cangar	7.7	PR + RK	5.5	-	-	-	-	-	-	-	926.3	175.7	1.102.0	-	-	1.102.0
P3-PHJD	APBN PHJD	191.12K	Jln. Raya Tulungrejo	7.2	PR + RK	5.2	-	-	-	-	-	-	-	731.2	177.8	909.0	-	-	909.0
P3-PHJD	APBN PHJD	191.13K	Jln. Raya Punten	1.5	PR + RK	7.0	-	-	-	-	-	-	-	77.6	30.8	108.5	-	-	108.5
P3-PHJD	APBN PHJD	191.14K	Jln. Bukit Berbunga	2.4	PR	7.0	-	-	-	-	-	-	-	76.7	49.3	126.0	-	-	126.0
P3-PHJD	APBN PHJD	191.15K	Jln. Brantas	0.8	PR + RK	9.1	-	-	-	-	-	-	-	36.0	17.3	53.2	-	-	53.2
P3-PHJD	APBN PHJD	192.11K	Jln. Trunojoyo	4.5	PR + RK	7.6	-	-	-	-	-	-	-	356.1	88.0	444.1	-	-	444.1
P3-PHJD	APBN PHJD	192.14K	Jln. Diponegoro	1.4	PR	8.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	27.7	28.0	-	-	28.0
P3-PHJD	APBN PHJD	192.15K	Jln. Patimura	1.4	PR + RK	7.0	-	-	-	-	-	-	-	280.1	26.9	307.0	-	-	307.0
P3-PHJD	APBN PHJD	192.16K	Jln. Ir. Soekarno	5.2	PR + RK	7.2	-	-	-	-	-	-	-	803.2	98.8	902.0	-	-	902.0
P3-PHJD	APBN PHJD	193.11K	Jln. Dr M. Hatta.	2.2	PR + RK	7.0	-	-	-	-	-	-	-	392.5	44.3	436.8	-	-	436.8
				<b>177.0</b>			-	<b>24.43</b>	-	-	-	-	-	<b>21.070.4</b>	<b>3.353.0</b>	<b>75.080.3</b>	<b>17.1</b>	<b>17.918.7</b>	<b>92.999.0</b>

Catatan :  
PB : Pemeliharaan Berkala  
PR : Pemeliharaan Rutin  
RK : Rutin Kondisi  
RH : Rehabilitasi  
PNK : Peningkatan